

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA

REGINA ARIYANTI, ST

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat evaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja pagu indikatif serta sumber dana yang dibutuhkan. Selain itu juga sebagai arah dan pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan tahunan.

Sedangkan tujuannya adalah melanjutkan program dan kegiatan yang sasarannya sudah tepat tetapi belum dapat dicapai pada periode sebelumnya serta menjamin keberlanjutan program dan kegiatan yang target sasarannya telah tercapai untuk mencapai nilai manfaat yang lebih baik lagi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini, dengan harapan kiranya Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini akan bermanfaat dan dapat menjadi pedoman bagi seluruh personil di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok sehari – hari.

Palembang, 2025
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



REGINA ARIYANTI, S.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196712042002122003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
a. Maksud	5
b. Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2025	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda	25
a. Tingkat Pelayanan Perangkat Daerah	26
1) Tugas.....	27
2) Fungsi.....	27
b. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA Sumatera Selatan	28
c. Dampak Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	30
d. Telaahan Keterkaitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA	31
e. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.....	35
f. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	36
g. Review Terhadap Rancangan RKPD	39
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	53
3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan	53
3.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi	53
3.3 Prioritas Perangkat Daerah	54
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	59
4.2 Rencana Tindaklanjut	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rincian Komponen Belanja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	6
Tabel 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan Pencapaian Renstra Bappeda s.d Tahun 2025 (Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2025 berdasarkan Renstra Perubahan 2025-2029)	7
Tabel 3 Realisasi Keuangan dan Fisik Triwulan III Tahun 2025	8
Tabel 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	24
Tabel 5 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	28
Tabel 6 Perumusan Strategi	37
Tabel 7 Strategi dan Kebijakan	37
Tabel 8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	40
Tabel 9 Prioritas Perangkat Daerah	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu tahap penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana Renja berfungsi sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Renja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan RPD Provinsi Sumatera Selatan, Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan serta berpedoman pada Renja Kementerian PPN/Bappenas. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya yaitu Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan Rencana Pembangunan jangka waktu lima tahunan (RPJMD). Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu.

Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Proses penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025 didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2025 berdasar pada:

- a. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- d. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4;

- e. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelola Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 25);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025);
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 9).
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi rumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang terarah, efektif dan efisien yang mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah juga dimaksudkan pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun 2025.

b. Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 bertujuan memperlancar tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai unsur pendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga dapat menyelenggarakan Program, Kegiatan, sub kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Hasil Evaluasi Perubahan RENJA Bappeda Tahun 2025

BAB III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Bappeda

BAB IV. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Triwulan III Tahun 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025 Bappeda telah mendapat alokasi anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 38.387.144.866,00. Rincian komponen belanja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.
Rincian Komponen Belanja Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Uraian	APBD 2025
1	Belanja Operasi	36.921.981.546
	a Belanja Pegawai	25.671.883.000
	b Belanja Barang dan Jasa	11.250.098.546
2	Belanja Modal	1.465.163.320
	a Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.465.163.320
	Total Belanja	38.387.144.866

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan yang ada di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Capaian realisasi keuangan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp 23.023.783.695,00 atau sebesar 59,98% dari Total Pagu Rp 38.387.144.866 pada APBD TA 2025. Adapun rekapitulasi program/kegiatan hasil kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan Pencapaian Renstra Bappeda s.d Triwulan III Tahun 2025

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target sd. trw.IV	Realisasi s.d. trw III	Target s.d Akhir Tahun	Realisasi sd. Trw. III
1	2	3	4	(5 = 3/2 *100%)	6	7
Total Belanja	38.387.144.866	23.023.783.695	100 %	59,98%	100 %	66,16%
Belanja Operasi	36.921.981.546	23.023.783.695	100 %	59,98%	100 %	66,16%
- Belanja Pegawai	25.671.883.000	18.069.437.887	100 %	70,39%	100 %	85,00%
- Belanja Barang Jasa	11.250.098.546	4.954.345.808	100 %	44,04%	100 %	47,32%
Belanja Modal	1.465.163.320	0	100 %	0,00%	0,00 %	0,00%

1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp. 23.023.783.695,- atau sebesar 59,98% dan realisasi fisik 66,16%.

2) Realisasi Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)

Realisasi Keuangan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Bappeda Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan III Tahun 2025, untuk realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 18.069.437.887,- atau sebesar 70,39% dan realisasi fisik 85,00%, untuk Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.954.345.808,- atau sebesar 44,04% dan realisasi fisik 47,32%.

3) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Bappeda Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan III Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dan realisasi fisik 0%. Adapun realisasi keuangan dan realisasi fisik pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Realisasi Keuangan dan Fisik Triwulan III
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik	Ket
								Keuangan		Fisik		
								(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	33,188,412,745	Kota Palembang	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	86.46	84.33	20,975,395,808.00	63.20	76.06	68.26	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140,988,950	Kota Palembang	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/berkembang	85%	0.37	100.00	44,539,402.00	31.59	70.00		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140,988,950	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen (Renstra, Renja, LKjIP, Sakip dan RB Bappeda)	0.37	100.00	44,539,402.00	31.59	70.00	0.26	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26,281,829,000	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	68.47	85.39	18,467,113,067.00	70.27	84.50		
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25,671,883,000	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	179 orang/bulan (160 org Gaji; 19 org)	66.88	85.33	18,069,437,887.00	70.39	85.00	56.84	
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	269,236,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 dokumen (32 SPK tenaga honor administrasi+ 1 SPK Tenaga Tutor SKJ)	0.70	98.19	241,142,000	89.57	95.00	0.67	

4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	283,160,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	0.74	75.81	127,254,000.00	44.94	78.00	0.58	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	57,550,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	0.15	100.00	29,279,180.00	50.88	80.00	0.12	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	145,320,000	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	0.38	100.00	98,730,750.00	67.94	100.00		
6	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	45,320,000	Kota Palembang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0.12	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100,000,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0.26	100.00	98,730,750.00	98.73	100.00	0.26	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	510,892,085	Kota Palembang	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	85%	1.33	82.13	140,734,338.00	27.55	82.50		
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Kota Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	155 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	66,800,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0.17	100.00	39,505,051.00	59.14	80.00	0.14	

10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	83,092,085	Kota Palembang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0.22	100.00	78,439,000.00	94.40	95.00	0.21	
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45,000,000	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0.12	90.00	22,790,287.00	50.65	70.00	0.08	
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	316,000,000	Kota Palembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	0.82	72.53	0.00	0.00	85.00	0.70	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,386,101,320	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	8.82	72.74	743,312,072.00	21.95	60.00		
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200,000,000	Kota Palembang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0.52	90.00	158,687,000.00	79.34	85.00	0.44	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,465,163,320	Kota Palembang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	507,265,000	Kota Palembang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjungan tamu)	1.32	77.63	171,380,701.00	33.79	75.00	0.99	

16	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	193,625,000	Kota Palembang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	0.50	87.09	95,148,000.00	49.14	70.00	0.35	
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	Kota Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	155 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	786,048,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	2.05	100.00	300,859,921.00	38.28	65.00	1.33	
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	234,000,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen (website dan buletin)	0.61	68.16	17,236,450.00	7.37	65.00	0.40	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0.00	Kota Palembang			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00	Kota Palembang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,514,000,000	Kota Palembang	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	3.94	84.91	947,322,240.00	62.57	68.75		
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan (1 laporan jumlah pengiriman surat)	0.03	100.00	3,002,900.00	30.03	55.00	0.01	

22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	822,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan (laporan pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	2.14	84.61	520,069,340.00	63.27	75.00	1.61	
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersihan dan Bahan pembersih yang digunakan)	0.19	100.00	39,000,000.00	54.17	70.00	0.13	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	610,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihkan; lap pengamanan kantor; spanduk dan dokumentasi)	1.59	83.28	385,250,000.00	63.16	75.00	1.19	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	1,209,281,390	Kota Palembang	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	85%	3.15	90.26	533,643,939.00	44.13	66.67	2.10	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230,000,000	Kota Palembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	0.60	91.30	82,688,091.00	35.95	60.00	0.36	
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243,588,340	Kota Palembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan&perlengkapan kantor)	0.63	92.70	158,003,620.00	64.87	85.00	0.54	

27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	735,693,050	Kota Palembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	1.92	89.13	292,952,228.00	39.82	55.00	1.05	
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	2,847,848,693	Kota Palembang	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	90%	7.42	95.92	1,288,937,876.00	45.26	64.72	5.55	
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,603,754,700	Kota Palembang	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	88%	4.18	96.49	894,270,225.00	55.76	77.50		
28	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	178,494,238	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2030;	0.46	98.32	0.00	0.00	25.00	0.12	
29	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	62,293,638	Kota Palembang	Jumlah Telahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen (1 Dok PK Gubernur dan 1 Dok RKT Provinsi Sumsel Tahun)	0.16	100.00	19,786,200.00	31.76	100.00	0.16	
30	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	531,600,000	Kota Palembang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara (BA MUSRENBAN G RKPD 2026 DAN BA MUSRENBAN G RPJMD 2025-2029)	1.38	100.00	460,537,700.00	86.63	100.00	1.38	

31	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	831,366,824	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	3 DOK (1 DOK RKPD 2026, 1 DOK PERUBAHAN RKPD 2025, 1 DOK RPJMD 2025-2029	2.17	93.59	413,946,325.00	49.79	85.00	1.84	
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	192,923,105	Kota Palembang	Persentase data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis	88%	0.50	100.00	61,419,830.00	31.84	50.00		
32	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	167,949,000	Kota Palembang	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen Data dan Informasi	0.44	100.00	61,419,830.00	36.57	50.00	0.22	
33	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	24,974,105	Kota Palembang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku (Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Parindag; Database Bidang Infrastruktur)	0.07	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,051,170,888	Kota Palembang	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi Minimal 75%	81%	2.74	94.29	333,247,821.00	31.70	66.67		

34	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	98,076,250	Kota Palembang	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1 Laporan SPIP	0.26	100.00	32,132,260.00	32.76	60.00	0.15	
35	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	48,254,638	Kota Palembang	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	0.13	100.00	4,076,700.00	8.45	20.00	0.03	
36	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	312,000,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	0.81	80.77	115,901,520.00	37.15	70.00	0.57	
37	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	592,840,000	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	5 DOKUMEN (1 DOK FASILITASI RANPERKADA RKPD KAB/KOTA 2026, 1 DOK FASILITASI RAPERKADA RKPD PERUBAHAN 2025 KAB/KOTA, 1 DOK FASILITASI RANWAL RANPERDA RPJMD KAB/KOTA 2025-2029, 1 DOK FASILITASI RAPERDA RPJMD KAB/KOTA 2025-2029, 1 DOK EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KAB/KOTA, 1 DOK HASIL PENILAIAN PPD KAB/KOTA)	1.54	100.00	181,137,341.00	30.55	70.00	1.08	

2.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0	Kota Palembang	Jumlah Aplikasi Sistem yang digunakan	1 Aplikasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
39	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	0		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2,350,883,428	Kota Palembang	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen	90%	6.12	98.10	759,450,011.00	32.30	57.71	3.69	
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	892,088,625	Kota Palembang	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	2.32	96.64	252,922,054.00	28.35	57.50		
40	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61,400,437	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0.16	100.00	13,217,710.00	21.53	60.00	0.10	

41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55,250,564		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0.14	100.00	5,200,000.00	9.41	55.00	0.08	
42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	58,460,296	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0.15	100.00	2,150,484.00	3.68	50.00	0.08	
43	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	95,654,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0.25	100.00	5,192,000.00	5.43	55.00	0.14	
44	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	178,490,399	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0.46	83.19	30,061,410.00	16.84	55.00	0.26	

45	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	58,470,613		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0.15	100.00	6,420,000.00	10.98	60.00	0.09	
46	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	58,670,624	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0.15	100.00	13,125,000.00	22.37	60.00	0.09	
47	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	325,691,692	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	0.85	100.00	177,555,450.00	54.52	65.00	0.55	
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	690,166,691	Kota Palembang	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	1.80	100.00	237,319,895.00	34.39	57.50		
48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	236,139,135	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	0.62	100.00	138,535,971.00	58.67	70.00	0.43	

49	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	52,097,038	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	0.14	100.00	3,396,600.00	6.52	50.00	0.07	
50	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	29,916,638	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	0.08	100.00	0.00	0.00	50.00	0.04	
51	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	207,737,860	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronisasi perencanaan prioritas investasi dan ekonomi kerakyatan)	0.54	100.00	60,591,221.00	29.17	65.00	0.35	
52	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31,319,790	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	0.08	100.00	13,100,985.00	41.83	65.00	0.05	
53	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	30,597,038	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0.08	100.00	0.00	0.00	50.00	0.04	

54	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28,203,802	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0.07	100.00	0.00	0.00	50.00	0.04	
55	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	74,155,390	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronisasi perencanaan prioritas SDA dan IPTEK)	0.19	100.00	21,695,118.00	29.26	60.00	0.12	
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	768,628,112	Kota Palembang	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	2.00	98.09	269,208,062.00	35.02	58.13		
56	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82,926,125	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, dan RKPD / Renja)	1 Dokumen	0.22	100.00	2,709,000.00	3.27	60.00	0.13	
57	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	72,391,125	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	0.19	100.00	16,458,440.00	22.74	55.00	0.10	

58	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	82,426,125	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	0.21	96.73	22,309,100.00	27.07	55.00	0.12	
59	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	89,956,125	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJ PD/RKP/RPJM pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	0.23	100.00	51,288,799.00	57.02	60.00	0.14	
60	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	148,991,422	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	0.39	98.32	41,266,759.00	27.70	55.00	0.21	
61	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	84,158,750	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	0.22	97.03	33,484,368.00	39.79	55.00	0.12	
62	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	82,356,000	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	0.21	100.00	5,692,496.00	6.91	50.00	0.11	

63	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	125,422,440	Kota Palembang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJ PD/RKP/RPJMN pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Infrastruktur; Jumlah Laporan yang disusun)	0.33	94.42	95,999,100.00	76.54	75.00	0.25	
	Jumlah 3 Program 15 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan	38,387,144,866				100.00	86.03	23,023,783,695.00	59.98	66.16	77.50	

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan BAPPEDA Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 dapat dilihat dari pencapaian kinerja sasaran dan capaian indikator kinerjanya pada tahun tersebut. Pada Tahun 2024-2026, BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2 indikator kinerja. Sementara untuk rincian capaian indikator kinerja sasaran pelayanan BAPPEDA Tahun 2024 sampai dengan 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator Kerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target			Capaian			Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Kesesuaian Sasaran Antar Dokumen Perencanaan			100%	100%	-	100%	100%		
2	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi			80% - 95%	80% - 95%	-	94,06%	70%		
3	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah			-	96,55	96,60	-			
4	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah			-	97,35	97,40	-			
5	Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN			-	90,05	90,10	-			
6	Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP			-	93,25	93,30	-			
7	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD			-	80-100	100	-			
8	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah			-	80-100	100	-			
9	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah			-	80-100	100	-			
10	Persentase target tujuan dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja Perangkat Daerah			-	100	100	-			
11	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah			-	100	100	-			

Capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 ditunjukkan melalui pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sedangkan capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (RPD) Tahun 2024-2026.

Adapun realisasi capaian indikator 1 pada Tahun Anggaran 2025 yaitu persentase kesesuaian sasaran antar dokumen dipakai untuk tahun 2025 dengan realisasi capaian untuk 2025 adalah 100%. Indikator 2 pada Tahun Anggaran 2025 yaitu persentase capaian sasaran daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi dengan realisasi capaian untuk 2025 adalah 70%.

Untuk Pencapaian Kinerja Bappeda Tahun 2025 dapat dilihat dari pencapaian kinerja sasaran dan capaian indikator kerjanya pada tahun tersebut. Pada tahun 2025, BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan memiliki 4 sasaran dan 8 indikator kinerja sasaran.

Adapun rincian capain kinerja untuk setiap sasaran yaitu :

- a. Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah
- b. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN
- c. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP
- d. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD
- e. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah
- f. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah
- g. Persentase target tujuan dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja Perangkat Daerah
- h. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah

2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga perencanaandan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas dan fungsi BadanPerencanaan Pembangunan Daerah yaitu membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan pengendalianpembangunan daerah. Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini memiliki 157orang pegawai yang terdiri dari 21 orang pejabat struktural, 59 orang pejabat fungsional, 53 orang staf dan 24 orang Tenaga Kerja Pemerintah Daerah (TKPD/Honorer). Komposisi pegawai tersebut masih belum sesuai dibandingkan dengan beban kerja yang membutuhkan ketepatan waktu, tepat sasaran dan tepat dari sisi anggaran. Demikian juga, dalam hal penempatan pegawai diharapkan sesuai peningkatan kompetensi SDM perencana dalam merencanakan perencanaan yang sesuai dengan perencanaan nasional dan daerah.

a. Tingkat Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami perubahan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1) Tugas

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

2) Fungsi

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur tersebut di atas menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- b) Pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RTRW, RPJMD, dan RKPD;
- c) Pengkoordinasian, pengsinergian, penyinkronisasian perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- d) Pengkoordinasian perencanaan kerjasama antar kabupaten/kota dalam provinsi, antar provinsi, dalam negeri dan luar negeri;
- e) Pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah Provinsi;
- f) Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- g) Penyiapan bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
- h) Penyediaan data, informasi dan laporan hasil - hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;
- i) Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- j) Pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memiliki mandat sebagai instansi yang menangani fungsi penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, dengan peran strategis sebagai koordinator, perumus kebijakan, pengendali serta evaluator pembangunan daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur melalui perencanaan yang memberikan panduan yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab memastikan proses perencanaan dilaksanakan secara sistematis, terukur, partisipatif serta harmonis antara kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun demikian, Dalam implementasi tugas dan fungsinya, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi berbagai tantangan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Dampak
Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Belum Optimalnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	– Belum adanya Data dan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. – Kapasitas SDM perencana masih terbatas, belum menguasai metodologi berbasis evidence-based policy. – Penyusunan dokumen masih administratif, kurang analisis substansi. – Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil evaluasi pembangunan sebelumnya.	– Dokumen perencanaan kurang responsif terhadap isu strategis. – Program/kegiatan yang direncanakan berpotensi tidak tepat sasaran. – Pembangunan daerah tidak berjalan efektif dan efisien.

	Belum Optimalnya Sinergitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	– Belum Optimalnya Konsistensi Sinkronisasi antara RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja. – Belum Optimalnya Koordinasi lintas perangkat daerah dan antar wilayah. – Belum Optimalnya Partisipasi stakeholder. – Belum Optimalnya Adaptasi Perubahan regulasi pusat ke Daerah.	– Terjadi tumpang tindih program/kegiatan antarperangkat daerah. – Prioritas pembangunan daerah sulit tercapai. – Rendahnya efektivitas penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarana).
	Belum Optimalnya Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	– Belum Optimalnya Integrasi antara dokumen perencanaan dan kinerja. – Belum Optimalnya Indikator kinerja perencanaan dengan indikator perangkat daerah. – Belum Optimalnya Konsistensi Penganggaran berbasis kinerja. – Belum Optimalnya Monitoring dan evaluasi yang memberi umpan balik maksimal.	– Kinerja pembangunan sulit diukur secara akurat. – Akuntabilitas pemerintah daerah menurun. – Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Selatan berpotensi stagnan atau menurun.
	Belum Optimalnya Tata Kelola Organisasi	– Belum Optimalnya Pemberian Kewenangan dan Tanggung Jawab Kerja – Belum Optimalnya Kapasitas dan Manajemen SDM – Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	– Terjadinya tumpang tindih atau kekosongan fungsi dalam pelaksanaan tugas – Terbatasnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan regulasi maupun teknologi – Efisiensi kerja menurun karena keterbatasan alat, fasilitas, maupun teknologi

c. Dampak terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Visi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah “SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA” dalam rangka mencapai visi tersebut dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 7 Misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.
2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2025-2029 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-6, yaitu “Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”. Khususnya terkait dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan dengan sasaran meningkatnya kualitas dan kapabilitas birokrasi.

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah, BAPPEDA memiliki peran sentral dalam memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Untuk itu, peningkatan kualitas dan kapabilitas birokrasi internal BAPPEDA menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya proses perencanaan yang berkualitas dan diharapkan akan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

d. Telaahan Keterkaitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai institusi yang memegang peranan strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang dirancang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan ketahanan wilayah terhadap berbagai tantangan jangka panjang. Dalam rangka penyusunan dokumen Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi suatu keharusan normatif dan substansial sebagai salah satu instrumen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kerangka kebijakan dan perencanaan sektoral maupun lintas sektor. KLHS pada Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai alat

evaluatif terhadap potensi dampak lingkungan dari kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga sebagai wahana strategis untuk mengidentifikasi isu-isu pembangunan utama yang bersifat sistemik, lintas wilayah, dan berdampak jangka panjang, khususnya terkait dengan pelestarian sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta penguatan tata kelola pembangunan daerah.

Dengan demikian, telaahan ini disusun untuk memberikan landasan ilmiah, analisis kritis, dan rekomendasi strategis guna mendukung penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang lebih responsif terhadap dinamika pembangunan dan selaras dengan komitmen nasional serta global terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

KLHS mengidentifikasi sembilan isu strategis pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

- a. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting yang menjadi masalah sosial yang saling terkait dan memberikan dampak jangka panjang pada pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, Kedua masalah ini memerlukan perhatian serius dan pendekatan yang terintegrasi untuk dapat diatasi dengan cepat dan efektif.
- b. Pengembangan potensi ekonomi daerah yang belum optimal menjadi salah satu isu yang signifikan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang beragam, seperti sektor pertanian, pariwisata, perikanan, industri kreatif, dan energi terbarukan. Namun, sering kali potensi ini belum dimaksimalkan karena berbagai hambatan yang menghalangi pembangunan daerah secara optimal.
- c. Kerentanan ketahanan pangan yang disebabkan karena tekanan pertumbuhan penduduk, stunting meningkat, kesejahteraan petani belum optimal, dan tata kelola pertanian dan perkebunan masih kurang optimal.

- d. Degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi isu yang perlu diperhatikan dengan tingginya konversi lahan, pencemaran wilayah, dan perubahan dan kerusakan habitat, termasuk mangrove. Kondisi penurunan kualitas sumber daya pesisir dan pulau - pulau kecil memberikan dampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat pesisir, jabitat, DDTL, dan semakin rentan akan bencana pesisir (intrusi air laut, abrasi, sedimentasi, dan sebagainya).
- e. Ancaman keanekaragaman hayati hal ini disebabkan karena degradasi keanekaragaman hayati darat dan perairan. Isu penurunan keanekaragaman hayati darat dan perairan termasuk di dalamnya eksploitasi sumber keanekaragaman jayati, konflik satwa-manusia, dan penurunan kondisi biofisik habitat satwa. Selain itu, berdasarkan pelingkupan potensi dampak yang ditimbulkan antara lain kepunahan spesies, korban jiwa dari konflik satwa manusia, dan menimbulkan ketidakstabilan ekologis. Dampak yang ditimbulkan juga berkaitan dengan alih fungsi lahan, kerusakan ekosistem gambut, dan perubahan iklim.
- f. Alih fungsi lahan dan hutan cukup masif terjadi dan memberikan dampak peningkatan lahan kritis (pada Tahun 2022, lahan kritis seluas 180.310,48 Ha (91,44 %) dan lahan sangat kritis seluas 16.868,84 Ha (8,56%)). Isu ini disepakati karena kerusakan gambut semakin meningkat, demikian pula dengan keadaan kebakaran hutan dan lahan gambut, pengelolaan mangrove yang kurang efektif, deforestasi terus meningkat, kemiskinan di lahan gambut, pengendalian dan reklamasi lahan tambang, serta ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Selain itu, isu alih fungsi lahan dan hutan memberikan risiko pada penurunan keanekaragaman hayati, degradasi hutan, konflik lahan, penurunan kesuburan tanah, dan secara makro berdampak pada perubahan iklim.

- g. Belum optimalnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti: meningkatnya kerentanan terhadap perubahan iklim, meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi, kerentanan daerah pesisir terhadap dampak perubahan iklim, pengelolaan persampahan dan limbah yang belum optimal, penurunan kualitas udara, rendahnya kapasitas adaptasi bencana, transisi energi baru terbarukan/rendah karbon, *climate-smart agriculture*, serta konektivitas infrastruktur kewilayahan terbatas.
- h. Belum optimalnya pengendalian terhadap pencemaran polusi dan kerusakan lingkungan membuat Sumatera Selatan menjadi salah satu Provinsi yang menyumbangkan polusi asap terbesar akibat terjadinya kebakaran lahan dan hutan, selain pada polusi kebakaran ini sendiri juga akan berdampak pada kerusakan ekosistem yang ada di sekitarnya termasuk kepada manusia.
- i. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, kondisi tersebut dapat tercermin pada saat musim kemarau panjang terlebih saat el nino terjadi berbagai wilayah di Sumatera Selatan mengalami kekeringan dan masyarakat susah untuk mendapatkan air bersih serta kebutuhan air untuk pertanian juga menjadi permasalahan yang dialami. Karena hal tersebut menyebabkan rendahnya capaian air minum dan sanitasi.

Dengan mengidentifikasi sembilan isu strategis yang mencerminkan kompleksitas tantangan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan, telaahan ini menegaskan bahwa peran Bappeda tidak hanya terfokus pada perencanaan program dan kegiatan pembangunan semata, tetapi juga pada bagaimana memastikan bahwa seluruh proses perencanaan berjalan selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen vital dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 mampu merespons isu-isu krusial secara terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Melalui integrasi KLHS ke dalam

proses penyusunan Renstra, diharapkan arah pembangunan daerah tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan wilayah, dan memperkuat fondasi Sumatera Selatan menuju pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

e. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai koordinator perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Tantangan utama adalah masih belum optimalnya kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan kualitas data dan informasi, variasi kapasitas perencana di perangkat daerah, serta lemahnya integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Selain itu, koordinasi lintas sektor maupun lintas wilayah belum berjalan maksimal, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih program dan belum sepenuhnya mampu menjawab isu-isu pembangunan yang kompleks, seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan wilayah, serta degradasi lingkungan.

Di sisi lain, Bappeda juga menghadapi tantangan terkait dinamika regulasi yang berkembang cepat di tingkat nasional. Perubahan kebijakan pusat yang tidak segera diadaptasi berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dengan dokumen perencanaan daerah. Perbedaan kemampuan fiskal antar kabupaten/kota juga menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan keselarasan pembangunan lintas wilayah.

Namun demikian, terdapat pula berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan Bappeda dalam meningkatkan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah. Dukungan regulasi nasional yang semakin menekankan pada akuntabilitas kinerja serta penerapan performance-based budgeting memberikan ruang bagi Bappeda untuk memperkuat fungsi koordinasi dan sinkronisasi. Momentum penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2025–2029 juga menjadi peluang penting untuk mendorong standarisasi kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah, sekaligus memastikan konsistensi antara RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja.

Selain itu, kemajuan teknologi informasi membuka peluang besar bagi pengembangan sistem perencanaan digital yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis data (evidence-based planning). Integrasi sistem informasi pembangunan melalui SIPD dan penguatan Satu Data Sumsel dapat meningkatkan akurasi, konsistensi, dan keterpaduan informasi dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan. Dukungan pemerintah pusat melalui program penguatan SAKIP dan penyusunan indikator kinerja utama juga memperkuat peran Bappeda dalam mengoordinasikan kinerja perangkat daerah.

Dengan tantangan dan peluang tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dituntut untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kompetensi perencana, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan wilayah. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas, konsisten, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil demi mendukung terwujudnya Sumatera Selatan yang maju, inklusif, dan berdaya saing.

f. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penentuan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari:

1. Kelompok sasaran layanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
2. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
3. Telahaan terhadap Kajian Lingkungan Hidup (KLHS).

Bappeda merupakan lembaga perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan- kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan

wilayah yang diharapkan mampu menghasilkan kualitas perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan yang kemudian teridentifikasi sebagai isu strategis dalam bidang perencanaan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.
Perumusan Strategi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten/kota Se-Sumatera Selatan	1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah 2. Belum optimalnya sinergitas dokumen perencanaan Pembangunan Daerah 3. Belum optimalnya keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja 4. Belum optimalnya tata kelola organisasi	Pembangunan berkelanjutan belum semuanya terintegrasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan di tingkat daerah	Belum Tercapainya Program SDG's Dan Transisi Energi Dalam Pembangunan Daerah	Belum Optimalnya Perubahan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Belum Berdampak Pada Daerah	Belum Optimalnya Kerjasama Perencanaan Pembangunan antar Wilayah	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Kebijakan dalam rencana strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan untuk lima tahun ke depan yaitu:

Tabel 7.
Strategi, dan Kebijakan

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	Rencana Strategis
1	SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Penggunaan SIPD untuk sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah, monitor penggunaan	Penerapan Sistem Pemerintahan Digital Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	Penguatan sistem perencanaan berbasis digital sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)	1. Optimalisasi penggunaan SIPD melalui pelatihan teknis berkelanjutan bagi perencana daerah. 2. Integrasi SIPD dengan Dokumen SIPD sehingga

	anggaran, dan kinerja program prioritas agar data dan informasi menjadi satu titik pantau yang bisa dipertanggungjawabkan			dokumen perencanaan, penganggaran, dan monitoring dapat ditelusuri dalam satu sistem 3. Penyusunan SOP digitalisasi perencanaan, untuk memastikan standar input, pengelolaan, dan validasi data lintas perangkat daerah.
2		Penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui teknologi informasi dan partisipasi publik digital	Pengembangan mekanisme perencanaan partisipatif berbasis digital, publikasi terbuka dokumen perencanaan, dan pemanfaatan dashboard kinerja	1. Publikasi dokumen perencanaan secara terbuka melalui website resmi Bappeda 2. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui media sosial resmi Bappeda, kanal konsultasi publik, dan aplikasi mobile. 3. Pengembangan dashboard kinerja yang dapat diakses publik dengan visualisasi capaian pembangunan secara real-time
3		Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas data dan informasi	Penguatan basis data sektoral dan spasial yang terintegrasi serta penyusunan dokumen perencanaan berbasis evidence	1. Penguatan sistem informasi geospasial (SIG) untuk mendukung analisis berbasis wilayah. 2. Kolaborasi dengan BPS, perguruan tinggi, dan lembaga riset guna memastikan kualitas dan validitas data perencanaan. 3. Pengembangan mekanisme verifikasi dan validasi data secara periodik agar tidak ada data tumpang tindih.

g. Review terhadap Rancangan RKPD

Penelaahan terhadap RKPD Provinsi Sumatera Selatan 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Bappeda yang tercantum di dalam RKPD Tahun 2026;
- 2) Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Bappeda berdasarkan analisis tahap – tahap sebelumnya;
- 3) Memastikan bahwa program/kegiatan di Bappeda yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD Tahun 2026;
- 4) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Bappeda yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai;
- 5) Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Bappeda hasil review terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap Program / Kegiatan; dan
- 6) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Proses penelaahan rancangan RKPD dan hasil analisis kebutuhan dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Bappeda dengan hasil pencapaian target tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 yang disusun telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Berdasarkan review terhadap rancangan RKPD dan hasil analisis kebutuhan pada Tabel 8 menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada rancangan RKPD Tahun 2025 telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda Tahun 2025.

Tabel 8.
Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PERENCANAAN					PERENCANAAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sumatera Selatan	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	30.902.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sumatera Selatan	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	33.188.412.745	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/berkembang	85%	380.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/berkembang	85%	140.988.950	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen (Renstra, Renja, LKjIP, Sakip dan RB Bappeda)	380.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen (Renstra, Renja, LKjIP, Sakip dan RB Bappeda)	140.988.950	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	23,475,802,950	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	26.281.829.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	179 orang/bulan (160 org Gaji; 19 org)	22,387,442,950	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	179 orang/bulan (160 org Gaji; 19 org)	25,671,883,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 dokumen (32 SPK tenaga honor administrasi+ 1 SPK Tenaga Tutor SKJ)	695,200,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 dokumen (32 SPK tenaga honor administrasi+ 1 SPK Tenaga Tutor SKJ)	269,236,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	283,160,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	283,160,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	110,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	57,550,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	150,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	145,320,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	45,320,000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen (Polis asuransi)	100,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	85%	850.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	85%	510.892.085	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya	250,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya	155 Paket		
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya	100,000,000	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	66,800,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	150,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	83,092,085	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	50,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	45,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Oranng	300,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	316.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	2,832,004,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	3,386.101.320	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	140,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	200.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1,042,004,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.465.163.320	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjungan tamu dan lapangan)	400,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjungan tamu dan lapangan)	507,265,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	100,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	193,625,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	50,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	155 paket		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	1,000,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	786,048,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen (website dan buletin)	100,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Kota Palembang , Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen (website dan buletin)	234,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				400.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	400.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palembang , Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Selatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	1,714,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Selatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	1,514,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan (1 laporan jumlah pengiriman surat, jumlah materai)	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palembang , Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan (1 laporan jumlah pengiriman surat)	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan (laporan pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Internet)	874,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palembang , Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan (laporan pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	822,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersihan dan Bahan pembersih yang digunakan)	120,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palembang , Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersihan dan Bahan pembersih yang digunakan)	72,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palembang, Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihkan; lap pengamanan kantor; spanduk dan dokumentasi)	710,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palembang , Ilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihkan; lap pengamanan kantor; spanduk dan dokumentasi)	610,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Selatan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	85%	1,100,693,050	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Selatan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	85%	1.209.281.390	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit Kendaraan	360,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	230,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	295,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	243,588.340	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	445,693,050	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kota Palembang, Iilir Timur I, Sungai Pangeran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	735.693.050	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sumatera Selatan	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	90%	5,572,115,074	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sumatera Selatan	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	90%	2.847.848.693	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Sumatera Selatan	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	88%	3,033,000,000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Sumatera Selatan	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	88%	1.603.754.700	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2030;	0	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2030;	0	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sumatera Selatan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen (1 Dok PK Gubernur dan 1 Dok RKT Provinsi Sumsel Tahun)	110,000,000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2030;	178,494,238	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Sumatera Selatan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	-	0	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Sumatera Selatan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	-	0	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara	625,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen (1 Dok PK Gubernur dan 1 Dok RKT Prov. Sumsel Tahun)	62,293,638	
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Sumatera Selatan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara (BA MUSRENBANG RKPD 2026 DAN BA MUSRENBANG RPJMD 2025-2029)	1,000,000,000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Sumatera Selatan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara (BA MUSRENBANG RKPD 2026 DAN BA MUSRENBANG RPJMD 2025-2029)	531,600,000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	3 Dokumen (1 Dok RKPD; 1 Dok Perubahan RKPD; 1 Dok RPJMD 2025-2029)	1,298,000,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	3 Dokumen (1 Dok RKPD; 1 Dok Perubahan RKPD; 1 Dok RPJMD 2025-2029)	831,366,824	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Selatan	Persentase data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis	88%	577,000,000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Selatan	Persentase data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis	88%	192,923,105	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen Data dan Informasi	302.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen Data dan Informasi	167,949,000	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-	0	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Sumatera Selatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah-	-	0	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Sumatera Selatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah-	-	0	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku (Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Parindag; Database Bidang Infrastruktur)	275,000,000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Palembang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku (Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Parindag; Database Bidang Infrastruktur)	24,974,105	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Selatan	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi Minimal 75%	81%	1,900,000,000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Selatan	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi Minimal 75%	81%	1.051.170.888	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Sumatera Selatan	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1 Laporan SPIP	190,000,000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Sumatera Selatan	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1 Laporan SPIP	98.076.250	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	110,000,000	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	48,254,638	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	17 Laporan (1 Lap RAD SDG's; 1 Lap RAD Pangan Gizi; 2 Lap Evaluasi Renja RKPD, APBN dan DAK; 2 Lap Evaluasi Renja PD; 1 Lap Hasil Raker Bappeda Kab/Kota)	600,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	312,000,000	
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	5 Dokumen (1 Dok Fasilitasi Ranperkada RKPD)	1,000,000,000	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	5 Dokumen (1 Dok Fasilitasi Ranperkada)	592,840,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Kab/Kota 2026, 1 Dok Fasilitas Raperkada RKPD Perubahan 2025 Kab/Kota, 1 Dok Fasilitas Ranwal Ranperkada RPJMD Kab/Kota 2025-2029, 1 Dok Fasilitas Raperkada RPJMD Kab/Kota 2025-2029, 1 Dok Evaluasi Kinerja Pembangunan Kab/Kota; 1 Dok Hasil Penilaian PPD Kab/Kota)		Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	RKPD Kab/Kota 2026, 1 Dok Fasilitas Raperkada RKPD Perubahan 2025 Kab/Kota, 1 Dok Fasilitas Ranwal Ranperkada RPJMD Kab/Kota 2025-2029, 1 Dok Fasilitas Raperkada RPJMD Kab/Kota 2025-2029, 1 Dok Evaluasi Kinerja Pembangunan Kab/Kota; 1 Dok Hasil Penilaian PPD Kab/Kota)		
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Aplikasi Sistem yang digunakan	1 Aplikasi	62,115,074	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Aplikasi Sistem yang digunakan	1 Aplikasi		
	Penelolaan Data dalam sistem informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Sumatera Selatan	Jumlah Data dalam sistem informasi pemerintah daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	-	0 31,057,537	Pengelolaan Data dalam sistem informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Sumatera Selatan	Jumlah Data dalam sistem informasi pemerintah daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	-	0	
	Penerapan Sistem informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)		Penerapan Sistem informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)		
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	31,057,537	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sumatera Selatan	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen	90%	4,325,000,000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sumatera Selatan	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen	90%	2,350,888,428	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sumatera Selatan	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	1,605,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sumatera Selatan	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	892,088,625	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	110,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	61,400,437	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	1 Laporan	100,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	1 Laporan	55,250,564	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	1 Laporan	100,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	1 Laporan	58,460,296	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	275,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	95,654,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang	1 Dokumen	220,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	1 Dokumen	178,490,399	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Selatan	Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	100,000,000	Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Selatan	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	58,470,613	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			58,670,624
	Koordinasi Pelaksanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan (2 Lap Kesos (RKT Kemiskinan, Lap SDG's); 5 Lap Kesra (Lap Stunting, Lap KKS, PUG, Kepemudaan))	600,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	325,691,692	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Sumatera Selatan	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	1,200,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Sumatera Selatan	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	690,166,691	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	400,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	236,139,135	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1 Laporan	55,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	5 Laporan	52,097,038	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Bidang Perekonomian		Daerah Bidang Perekonomian			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1 Laporan	55,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Perekonomian	1 Laporan	29,916,638	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronisasi perencanaan prioritas investasi dan ekonomi kerakyatan)	360,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronisasi perencanaan prioritas investasi dan ekonomi kerakyatan)	207,737,860	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	55,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	31,319,790	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Laporan	55,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Laporan	30,597,038	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Laporan	55,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Laporan	28,203,802	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronisasi perencanaan prioritas SDA dan IPTEK)	165,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronisasi perencanaan prioritas SDA dan IPTEK)	74,155,390	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Sumatera Selatan	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	1,520,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Sumatera Selatan	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	81%	768,628,112	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, dan RKPD / Renja)	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, dan RKPD / Renja)	1 Dokumen	165,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, dan RKPD / Renja)	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, dan RKPD / Renja)	1 Dokumen	82,926,125	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan RKPD/Renja Bidang Infrastruktur	6 Laporan	110,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan RKPD/Renja Bidang Infrastruktur	6 Laporan	72,391,125	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang Infrastruktur	6 Laporan	165,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang Infrastruktur	6 Laporan	82,426,125	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/RKP/RPJMN pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	220,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/RKP/RPJMN pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	89,956,125	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD dan Renja/RKPD)	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	365,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD dan Renja/RKPD)	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	148,991,422	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renja/RKPD Bidang Kewilayahan	2 Laporan	110,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Pelaksanaan	Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renja/RKPD Bidang Kewilayahan	2 Laporan	84,158,750	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan RKPD/Renja dan RPJPD Bidang Kewilayahan	1 Laporan	110,000,000	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan RKPD/Renja dan RPJPD Bidang Kewilayahan	1 Laporan	82,356,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/RKP/RPJMN pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Infrastruktur; Jumlah Laporan yang disusun)	275,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/RKP/RPJMN pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Infrastruktur; Jumlah Laporan yang disusun)	125,422,440	
Jumlah					40.799.615.074	Jumlah					38.387.144.866

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

3.1. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda tahun 2025-2029, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3 Tabel 8 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

3.2. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang urusan Perencanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tidak secara langsung mendukung Prioritas Provinsi namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi dimaksud, Bappeda berperan dalam melakukan koordinasi dan

sinkronisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD/RPD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.3. Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9
Prioritas Perangkat Daerah

Program Prioritas Daerah	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
				Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	Sumatera Selatan	3.012.048.693	
	05.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	Sumatera Selatan	1,767,954,700	
	05.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Sumatera Selatan	0	PAD
	05.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Selatan	78,494,238	PAD
	05.01.02.1.003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Sumatera Selatan	0	PAD
	05.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	76,493,638	PAD
	05.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Sumatera Selatan	781,600,000	PAD

	05.01.02.1 .01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Sumatera Selatan	831,366,824	PAD
	05.01.02.1 .02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis	Sumatera Selatan	192,923,105	PAD
	05.01.02.1 .02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Sumatera Selatan	167,949,000	PAD
	05.01.02.1 .02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah-	Sumatera Selatan	0	PAD
	05.01.02.1 .02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Sumatera Selatan	24,974,105	PAD
	05.01.02.1 .03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi Minimal 75%	Sumatera Selatan	1,051,170,888	
	05.01.02.1 .03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Sumatera Selatan	98,076,250	PAD
	05.01.02.1 .03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Sumatera Selatan	48,254,638	PAD
	05.01.02.1 .03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Sumatera Selatan	312,000,000	PAD
	05.01.02.1 .03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Sumatera Selatan	592,840,000	PAD
	05.01.02.1 .04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi Sistem yang digunakan	Sumatera Selatan	0	PAD
	05.01.02.1 .04.01	Pengelolaan Data dalam sistem informasi pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Data dalam sistem informasi pemerintah daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Sumatera Selatan	0	PAD
	05.01.02.1 .04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Sumatera Selatan	0	PAD

	05.01.02.1 .04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Sumatera Selatan	0	PAD
	05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen	Sumatera Selatan	2,350,883,428	
	05.01.03.1 .01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	Sumatera Selatan	892,088,625	
	05.01.03.1 .01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Selatan	61,400,437	PAD
	05.01.03.1 .01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Sumatera Selatan	55,250,564	PAD
	05.01.03.1 .01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Sumatera Selatan	58,460,296	PAD
	05.01.03.1 .01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Sumatera Selatan	95,654,000	PAD
	05.01.03.1 .01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Selatan	178,490,399	PAD
	05.01.03.1 .01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Sumatera Selatan	58,470,613	PAD
	05.01.03.1 .01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Sumatera Selatan	58,670,624	PAD

	05.01.03.1 .01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Sumatera Selatan	325,691,692	PAD
	05.01.03.1 .02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	Sumatera Selatan	690,166,691	
	05.01.03.1 .02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Selatan	236,139,135	PAD
	05.01.03.1 .02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Sumatera Selatan	52,097,038	PAD
	05.01.03.1 .02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Sumatera Selatan	29,916,638	PAD
	05.01.03.1 .02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Sumatera Selatan	207,737,860	PAD
	05.01.03.1 .02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Selatan	31,319,790	PAD
	05.01.03.1 .02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Sumatera Selatan	30,597,038	PAD
	05.01.03.1 .02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Sumatera Selatan	28,203,802	PAD
	05.01.03.1 .02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Sumatera Selatan	74,155,390	PAD
	05.01.03.1 .03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	Sumatera Selatan	768,628,112	

	05.01.03.1 .03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, dan RKPD / Renja)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, dan RKPD / Renja)	Sumatera Selatan	60,684,000	PAD
	05.01.03.1 .03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan RKPD/Renja Bidang Infrastruktur	Sumatera Selatan	57,000,000	PAD
	05.01.03.1 .03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bidang Infrastruktur	Sumatera Selatan	141,238,570	PAD
	05.01.03.1 .03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/R KP/RPJMN pada Bidang Infrastruktur	Sumatera Selatan	68,776,930	PAD
	05.01.03.1 .03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD dan Renja/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Selatan	148,991,422	PAD
	05.01.03.1 .03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renja/RKPD Bidang Kewilayahan	Sumatera Selatan	84,158,750	PAD
	05.01.03.1 .03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan RKPD/Renja dan RPJPD Bidang Kewilayahan	Sumatera Selatan	82,356,000	PAD
	05.01.03.1 .03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/R KP/RPJMN pada Bidang Kewilayahan	Sumatera Selatan	125,422,440	PAD

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2025 sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, maka sinkronisasi program/kegiatan di dalam Perubahan Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang – bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Bappeda Provinsi Sumatera Selatan merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

4.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai rencana yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Provinsi Sumatera Selatan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

- 1) melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
 - 2) menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkan nya Perubahan Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKAP) dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD).

Palembang,

2025

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

The image shows a circular official stamp of the Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) of South Sumatra Province. The stamp contains the text "PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN" and "BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

REGINA ARIYANTI, S.T

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196712042002122003